

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah global yang menjadi tantangan di seluruh dunia. Kemiskinan menjadi momok bagi tiap negara mulai dari negara berkembang hingga negara maju. Kemiskinan menjadi masalah yang serius dan dapat mempengaruhi kehidupan tiap negara. Namun kemiskinan paling banyak ditemui di negara berkembang.¹ Kemiskinan merupakan bentuk permasalahan yang seringkali terkait dengan kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari. Rendahnya sumber daya seseorang yang menjadi penyebab sulitnya memenuhi kebutuhan dasar. Sumber daya yang terbatas, seperti pendapatan, pendidikan, dan layanan kesehatan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan utama seperti makanan, rumah, dan pendidikan, sehingga masyarakat akan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan yang layak.²

Menurut teori *Nurkse* dalam penelitian Ayu Salsabilla dkk, kemiskinan berkaitan erat dengan yang disebut sebagai "lingkaran setan" (*vicious circle of poverty*). Lingkaran setan menjadi suatu konsep yang menggambarkan bagaimana kondisi kemiskinan dapat memicu lebih banyak kemiskinan dalam masyarakat yang dimulai dengan rendahnya tingkat pendapatan dan aset di antara individu atau keluarga yang hidup dalam kemiskinan.³ Kondisi ini yang kemudian menciptakan hambatan yang menghalangi akses mereka terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Dengan keterbatasan pendidikan dan layanan kesehatan, individu tersebut memiliki kesulitan untuk meningkatkan kualifikasi dan produktivitas mereka, yang pada gilirannya menyebabkan pendapatan yang tetap rendah.⁴ Ini menciptakan lingkaran setan yang

¹ Shidiq Ramdan Dinata, Mahendra Romus dan Yanti, "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau Tahun 2003-2018," *Jurnal Al-Iqtishad* 2, no. 16 (2020): 116–37.

² Yulia Adella Sari, "Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah," *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 10, no. 2 (1 Oktober 2021): 121–30, <https://doi.org/10.35906/je001.v10i2.785>.

³ Ayu Salsabilla, Indri Arrafi Juliannisa, dan Nunuk Triwahyuningtyas, "Analisis Faktor-Faktor Kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA* 5, no. 2 (2022): 96–105.

⁴ Dewi Kusuma Wardani dan Ratih Ranika Putri Utami, "Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap

terus berputar di mana kemiskinan menghasilkan lebih banyak kemiskinan, dengan generasi selanjutnya juga terjebak dalam kondisi yang sama. Teori *Nurkse* menggaris bawahi pentingnya tindakan yang tepat oleh pemerintah agar lingkaran setan dapat terputus sehingga kemiskinan dapat teratasi.⁵

Kemiskinan telah menjadi masalah yang mendasar yang dihadapi negara Indonesia sepanjang sejarahnya, dan permasalahan ini masih relevan hingga pada saat ini. Pemerintah Indonesia telah membuat rencana dan mengambil berbagai langkah dalam upaya yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia. Penyelesaian yang dapat diterapkan dengan melalui perencanaan dan implementasi berbagai kebijakan dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan.⁶

Data BPS pada saat ini di Indonesia terdapat jumlah masyarakat miskin yang masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2019, per bulan Maret 2023 kemiskinan di Indonesia masih sebanyak 9,36% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang bisa mencapai 9,22%. Tingkat kemiskinan di Indonesia yang tercatat di BPS tahun 2022 sebanyak 9,57%. Tahun 2022 kemiskinan mengalami telah mengalami penurunan dari 9,71% menjadi 9,57%. Penurunan yang terjadi pada tahun 2022 menunjukkan bahwa pemerintah tidak berhasil dalam merealisasikan sasaran pengurangan tingkat kemiskinan yang ingin direalisasikan tahun 2022. Pemerintah berencana dapat menurunkan kemiskinan menjadi 8,5% hingga 9%.⁷ Pada tahun 2008 dan tahun 2009 tingkat penurunan diatas 1% namun setelah itu turunnya kemiskinan mulai dari tahun 2010 sampai 2022 hanya kurang dari 1% yaitu kisaran 0,1 sampai 0,8%. Namun pada tahun 2020 kemiskinan meningkat hingga 0,97%. Data tersebut dapat membuktikan berkurangnya penduduk miskin tidak cukup banyak karena kebijakan yang diterapkan belum optimal.

Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo,” *Jurnal Kajian Bisnis* 28, no. 1 (2020): 35–50, <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.36>.

⁵ Lufi Supratiyoningsih dan Ni Nyoman Yuliarimi, “Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali,” *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 11, no. 01 (18 Januari 2022): 1–14, <https://doi.org/10.24843/EEB.2022.v11.i01.p01>.

⁶ Laily Nur Aini dan Sulaiha Nor Islamy, “Dampak pengangguran, pendidikan, kesehatan, PDRB dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Indonesia,” *Journal of Economics Research and Policy Studies* 1, no. 3 (28 Desember 2021): 132–41, <https://doi.org/10.53088/jerps.v1i3.325>.

⁷ Salsa Amanda dan Muhammad Anwar Fathoni, “Pengaruh Dana ZIS dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Mediasi Pertumbuhan Ekonomi,” *Islamic Economics and Business Review* 2, no. 2 (11 September 2023): 250–71, <https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i2.6278>.

Terjadinya kemiskinan memiliki berbagai penyebab yang berbeda-beda. Indeks pembangunan manusia dapat menjadi penyebab kemiskinan karena dengan kualitas sumber daya manusia saat ini akan dipengaruhi oleh randahnya pembangunan manusia.⁸ Menurut teori Neo-liberal kemiskinan akan hilang dengan sendirinya jika pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya sehingga kemiskinan dapat teratasi.⁹

IPM merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas kehidupan manusia, yang mencakup beberapa aspek seperti kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan seringkali kesulitan dalam mengakses pelayanan dalam bidang kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, sehingga dapat memiliki IPM yang rendah. IPM memiliki beberapa dimensi yang meliputi kelayakan hidup, pendidikan, dan usia. Pengelompokan IPM yaitu rendah (kurang dari 60), sedang (60-69), tinggi (70-79), dan sangat tinggi (lebih dari 80).¹⁰ IPM mengukur aspek-aspek kesejahteraan manusia, termasuk tingkat pendidikan, harapan hidup, dan pendapatan perkapita. Meningkatkan IPM dapat menurunkan tingkat kemiskinan karena IPM memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan jika IPM naik maka kemiskinan akan menurun.

Penelitian Shidiq Ramdan Dinata, Mahendra Romus dan Yanti pada 2020 dengan judul "Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Riau Tahun 2003-2018". Menunjukkan hasil bahwa IPM berpengaruh terhadap Kemiskinan karena IPM sangat menentukan kualitas manusia dan mengetahui sejauh mana pembangunan yang telah dilakukan jika IPM naik maka kemiskinan akan berkurang.¹¹ Berbeda dengan hasil penelitian Lily Leonita dan Rini Kurnia Sari pada tahun 2019 dengan judul "Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Indonesia". Menunjukkan hasil bahwa IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap

⁸ Sinta Sinta dan Eny Fahrati, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Perkapita Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2019," *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 5, no. 1 (31 Mei 2022): 81, <https://doi.org/10.20527/jiep.v5i1.5501>.

⁹ Julina Sari, "Analisis Tingkat Kemiskinan Masyarakat Di Provinsi Sumatera Utara," *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 7, no. 2 (2019): 290–304.

¹⁰ Lily Leonita dan Rini Kurnia Sari, "Pengaruh PDRB, Pengangguran Dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Indonesia," *Isoquant : Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 3, no. 2 (17 Oktober 2019): 1, <https://doi.org/10.24269/iso.v3i2.252>.

¹¹ Dinata, Romus dan Yanti, "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau Tahun 2003-2018."

kemiskinan karena aspek IPM belum merata di semua kalangan sehingga orang miskin masih memiliki standar hidup yang rendah.¹²

Selain IPM, kemiskinan juga dapat dilihat dari berbagai perspektif, yang diantaranya adalah ketenagakerjaan. Lufi Supratyoningasih dan Ni Nyoman Yuliarmi menyatakan tenaga kerja merupakan salah satu faktor untuk menurunkan kemiskinan.¹³ Menurut teori Neo-liberal kemiskinan akan hilang dengan sendirinya jika kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya sehingga kemiskinan dapat teratasi.¹⁴ Dasar dari upaya bekerja bagi seseorang yaitu agar memperoleh penghasilan yang memungkinkan bagi mereka untuk terpenuhinya kebutuhan hidup mereka. Dalam konteks ini, penghasilan dari pekerjaan menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan individu dan keluarganya. Jika penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan belum mampu untuk mencukupinya kebutuhan utama seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan, maka hal ini bisa mengakibatkan terjadinya kemiskinan.¹⁵

Dari sisi perekonomian, tenaga kerja memiliki peran penting untuk membantu jalannya proses ekonomi secara langsung. Jika tenaga kerja meningkat akan menyebabkan produktivitas meningkat. Namun tidak tersedianya pekerjaan yang layak dapat menjadi faktor penting yang berkontribusi pada kemiskinan. Banyak individu yang terpinggirkan sulit untuk memasuki pasar tenaga kerja atau bekerja dalam kondisi yang tidak stabil. Inilah sebabnya mengapa kebijakan ekonomi dan lapangan kerja yang inklusif sangat penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan.¹⁶

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Lufi Supratyoningasih dan Ni Nyoman Yuliarmi pada tahun 2022 dengan judul "Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali". Menunjukkan hasil bahwa tenaga kerja berpengaruh terhadap kemiskinan karena tenaga kerja yang

¹² Leonita dan Sari, "Pengaruh PDRB, Pengangguran Dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Indonesia."

¹³ Supratyoningasih dan Yuliarmi, "Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali."

¹⁴ Sari, "Analisis Tingkat Kemiskinan Masyarakat Di Provinsi Sumatera Utara."

¹⁵ Dessy Chayani Elisabeth Sitanggal, "Analysis Of Poverty Influence Onhuman Development Index And Laborin North Sumatera Province," *Cermin : Jurnal Penelitian* 4, no. 2 (2020): 225–232.

¹⁶ Rahma Aprilia dan Rr Retno Sugiharti, "Pengaruh Pendidikan, Tenaga Kerja dan Kesehatan terhadap Kemiskinan (Studi Kasus pada Provinsi Bali)," *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 5, no. 2 (27 November 2022): 637, <https://doi.org/10.20527/jiep.v5i2.6638>.

semakin banyak dapat membuat produktivitas meningkat sehingga akan diikuti dengan meningkatnya PDRB perkapita.¹⁷

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Supratyoningasih dan Yuliarmi, penelitian Dessy Chayani Elisabeth Sitanggang pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Tenaga Kerja terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatra Utara yang menunjukkan hasil bahwa IPM dan tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan karena hanya mempengaruhi 6% kemiskinan di Sumatra Utara sedangkan 94% kemiskinan tersebut dipengaruhi oleh faktor yang lain.¹⁸

Selain dengan IPM dan tenaga kerja, upaya untuk mengatasi kemiskinan tidak hanya dari perspektif ekonomi saja. Zakat, infaq, dan shadaqah dalam agama Islam berperan sebagai sumber penerimaan negara. ZIS dapat dihubungkan dengan teori neo-liberal yang menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan karena perbuatannya sendiri. Orang miskin merasa dirinya sudah cukup dengan menggantungkan kebutuhan melalui pemberian orang lain tanpa adanya usaha untuk bangkit dari kemiskinan.¹⁹ Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) memiliki fungsi lain sebagai instrumen pendukung dalam implementasi bantuan sosial mandiri. Kewajiban moral bagi masyarakat yang memiliki kekayaan untuk memberikan dukungan kepada yang membutuhkan melalui ZIS diharapkan dapat berkontribusi pada upaya penghapusan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat. ZIS merupakan bagian penting dalam upaya agama Islam untuk mengentaskan kemiskinan dan membantu mereka yang kurang beruntung dalam masyarakat. Selain memiliki dampak yang positif secara sosial, praktik-praktik ini juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepedulian yang mendalam dalam kerangka pemikiran Islam.²⁰

Hasil penelitian Bariyyatin Nafi'ah pada tahun 2021 dengan judul "Analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengentasan kemiskinan di Indonesia (2016-2019)". Menunjukkan hasil ZIS memiliki

¹⁷ Supratyoningasih dan Yuliarmi, “Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali.”

¹⁸ Chayani Elisabeth Sitanggang, “Analysis Of Poverty Influence Onhuman Development Index And Laborin North Sumatera Province.”

¹⁹ Muhammad Fatchullah El Islami dan Achmad Room Fitrianto, “Pengaruh Penyaluran Dana ZIS, Inflasi, Dan Gini Ratio Terhadap Tingkat Kedalaman Kemiskinan Satu Dekade,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 229–39, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6994>.

²⁰ Bariyyatin Nafi'ah, “Analisis Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (2016- 2019),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (1 Juli 2021): 953–60, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2206>.

pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan karena zakat memiliki kemampuan untuk menggunakan potensi ekonomi sebagai sumber dana untuk membangun sarana dan prasarana sosial ekonomi yang dibutuhkan masyarakat.²¹

Penelitian Hanifah Khusnul Karimah dan Siti Aisyah pada tahun 2023 dengan judul "Pengaruh Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dan indikator ekonomi makro terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh tahun 2018-2020". Menunjukkan hasil yang berbeda yaitu ZIS tidak dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan disebabkan dana ZIS tidak sebanding dengan kebutuhan pokok masyarakat sehingga kurang efektif untuk mengurangi kemiskinan.²²

Pendapatan memiliki fungsi yang sangat signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Naiknya pendapatan dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini dikarenakan pendapatan sebagai sumber utama untuk dapat mencukupi berbagai kebutuhan dasar. Ketika pendapatan meningkat maka akan memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik.²³ Berdasarkan teori Neo-liberal sebagai teori kemiskinan, kemiskinan akan hilang dengan sendirinya jika pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya sehingga kemiskinan dapat teratasi. Pendapatan perkapita memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Jika pendapatan per kapita meningkat hal itu akan menyebabkan seseorang memiliki daya beli yang meningkat sehingga dapat mendorong konsumsi, investasi dan aktivitas ekonomi meningkat sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.²⁴

Menurut Todaro, dalam penelitian Wildan Arya Wicaksana dan Wiwin Priana Primandhana, tolak ukur sebuah pembangunan adalah pendapatan perkapita karena pendapatan perkapita merupakan tujuan dari pembangunan adalah menaikkan pendapatan agar masyarakat mampu mencukupi kebutuhannya.²⁵ Dengan pendapatan yang tinggi masyarakat

²¹ Nafi'ah, "Analisis Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (2016- 2019)."

²² Hanifah Khusnul Karimah dan Siti Aisyah, "Pengaruh Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dan Indikator Ekonomi Makro Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2018-2020," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1243–50, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7961>.

²³ Nurlaila Maysaroh Chairunnisa dan Yuha Nadhirah Qintharah, "Pengaruh Kesehatan, Tingkat Pendidikan, dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020," *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)* 7, no. 1 (27 Januari 2022): 147–61, <https://doi.org/10.51289/peta.v7i1.530>.

²⁴ Sari, "Analisis Tingkat Kemiskinan Masyarakat Di Provinsi Sumatera Utara."

²⁵ Wildan Arya Wicaksana dan Wiwin Priana Primandhana, "Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, dan Sektor Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Probolinggo," *Jurnal Ilmiah*

bisa mencukupi kebutuhannya dan dapat menyimpannya untuk masa yang akan datang berbeda jika pendapatan yang didapatkan rendah maka masyarakat tidak mampu mencukupi kebutuhannya sehingga dapat meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Murbanto Sinaga dkk menyatakan bahwa Pendapatan per kapita yang meningkat akan berdampak pada penurunan kemiskinan secara nyata.²⁶

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sodik Dwi Purnomo dan Suharno pada tahun 2020 dengan judul “Hubungan pendidikan dan kemiskinan: pendekatan variabel mediasi pendapatan perkapita” menunjukkan hasil pendapatan perkapita dapat memediasi hubungan pendidikan terhadap kemiskinan karena meningkatkan pendidikan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan sehingga akan mengurangi kemiskinan.²⁷

Namun penelitian yang dilakukan oleh Salsa Amanda dan Muhammad Anwar Fathoni pada tahun 2023 dengan judul “Pengaruh dana ZIS dan Inflasi terhadap tingkat kemiskinan dengan mediasi pertumbuhan ekonomi” menunjukkan hasil karena pertumbuhan ekonomi stagnan dan bahkan mengalami resesi yang disebabkan oleh faktor eksternal lain, seperti pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan konsep pendapatan nasional, atau PDB, tidak dapat memediasi pengaruh dana ZIS dan inflasi terhadap kemiskinan secara signifikan.²⁸

Universitas Batanghari Jambi 23, no. 3 (2023): 3363–69, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i3.4067>.

²⁶ Murbanto Sinaga dkk., “Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Per Kapita Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kepulauan Nias,” *Jurnal Ekuilnomi* 5, no. 1 (15 Juni 2023): 140–52, <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i1.699>.

²⁷ Sodik Dwi Purnomo, Istiqomah Istiqomah, dan Suharno Suharno, “Hubungan Pendidikan Dan Kemiskinan: Pendekatan Variabel Mediasi Pendapatan Per Kapita,” *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 9, no. 6 (27 Juni 2020): 539–60, <https://doi.org/10.24843/EEB.2020.v09.i06.p04>.

²⁸ Amanda dan Anwar Fathoni, “Pengaruh Dana ZIS dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Mediasi Pertumbuhan Ekonomi.”

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin, IPM, Tenaga Kerja, ZIS dan Pendapatan Perkapita di Indonesia tahun 2007-2022.

Tahun	Penduduk Miskin (%)	IPM (%)	Tenaga kerja (Jiwa)	ZIS	Pendapatan Perkapita
2007	16,58	70,59	99.930.220	740.000.000.000	17.600.000
2008	15,42	71,17	102.552.750	920.000.000.000	21.700.000
2009	14,15	71,76	104.870.660	1.200.000.000.000	24.300.000
2010	13,33	66,53	108.207.770	1.500.164.240.975	27.000.000
2011	12,49	67,09	107.416.310	1.729.000.000.000	30.800.000
2012	11,66	67,70	112.504.870	2.212.000.000.000	33.300.000
2013	11,47	68,31	112.761.070	2.639.000.000.000	36.500.000
2014	10,96	68,90	114.628.030	3.300.000.000.000	41.800.000
2015	11,13	69,55	114.819.200	3.650.000.000.000	45.200.000
2016	10,70	70,18	118.411.970	5.017.290.000.000	47.960.000
2017	10,12	70,81	121.022.420	6.224.371.269.471	51.890.000
2018	9,66	71,39	126.282.190	8.117.597.683.267	56.000.000
2019	9,22	71,92	128.755.270	10.227.943.806.555	59.000.000
2020	10,19	71,94	128.454.180	12.510.541.907.699	56.900.000
2021	9,71	72,29	131.050.520	14.222.002.607.119	62.200.000
2022	9,57	72,91	135.296.710	22.475.655.478.672	71.000.000

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) dan Baznas diolah tahun 2023

Jika dilihat dari tabel 1.1 pada tahun 2015 dan 2020 Indonesia mengalami kenaikan tingkat kemiskinan. Pada tahun 2015 kenaikan kemiskinan di Indonesia karena adanya inflasi 4,03%, kenaikan harga

BBM dan upah buruh tani yang menurun 1,34%. Sedangkan pada tahun 2020 kenaikan kemiskinan di Indonesia karena terjadi pandemi Covid-19. Terjadinya pandemi kondisi kemiskinan di Indonesia sampai kini belum bisa lebih rendah dari sebelum adanya pandemi tahun 2019.

Jika dilihat dari tabel 1.1 tahun 2010 IPM di Indonesia terjadi penurunan dari 71,76% menjadi 66,53% namun kenyataannya penurunan nilai IPM tersebut tidak membuat jumlah penduduk miskin meningkat. Mulai tahun 2010 hingga tahun 2022 IPM di Indonesia terus mengalami peningkatan namun pada kenyataannya pada tahun 2015 dan 2020 jumlah orang miskin di Indonesia justru meningkat, yang bertentangan dengan teori kemiskinan apabila IPM naik maka jumlah penduduk miskin akan berkurang.²⁹

Berdasarkan tabel 1.1 tenaga kerja pada tahun 2011 mengalami penurunan namun jumlah kemiskinan di Indonesia tidak bertambah. Sedangkan tahun 2015 jumlah kemiskinan di Indonesia meningkat tetapi jumlah tenaga kerja di Indonesia tidak mengalami penurunan. Pada tahun 2020 kemiskinan meningkat hingga 0,97% dan diikuti dengan penurunan tenaga kerja namun tidak signifikan hanya menurun 0,03% hal tersebut tidak sebanding dengan penurunan kemiskinan dan kenaikan tenaga kerja pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 kemiskinan masih diatas tahun 2019 namun tenaga kerja tahun 2022 lebih tinggi daripada tahun 2019 seharusnya tingkat kemiskinan di Indonesia dapat menurun dibawah tahun 2019, sehingga bertentangan dengan teori kemiskinan apabila kemiskinan naik, jumlah tenaga kerja menurun begitu pula sebaliknya karena hubungan tenaga kerja dengan kemiskinan memiliki hubungan yang negatif.³⁰

ZIS di Indonesia mengalami kenaikan tiap tahunnya yang ditunjukkan dalam tabel 1.1, namun pada kenyataannya yang terjadi tahun 2015 dan 2020 jumlah kemiskinan mengalami pertumbuhan. Fenomena tersebut tidak sesuai dengan teori kemiskinan jika semakin tinggi ZIS, semakin rendah kemiskinan.³¹

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa pendapatan perkapita di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun pada kenyataannya kejadian tahun 2015 dan 2020 jumlah kemiskinan semakin banyak. Fenomena tersebut tidak sesuai dengan teori kemiskinan jika

²⁹ Aini dan Islamy, “Dampak pengangguran, pendidikan, kesehatan, PDRB dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Indonesia.”

³⁰ Supratyoningsih dan Yuliarini, “Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali.”

³¹ Amanda dan Anwar Fathoni, “Pengaruh Dana ZIS dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Mediasi Pertumbuhan Ekonomi.”

pendapatan perkapita mengalami kenaikan maka kemiskinan akan berkurang.³²

Pada saat ini per Maret 2023 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan namun tingkat penurunan tersebut masih diatas tahun 2019. Pada tahun 2019 persentase kemiskinan di Indonesia 9,22% jumlah tersebut di bawah dari tahun 2023 yang persentasenya 9,36%. Tahun 2022 yang ditunjukkan pada tabel 1.1 memperlihatkan tingkat kemiskinan di Indonesia 9,57% kondisi tersebut masih diatas tahun 2019 tetapi IPM, Tenaga Kerja, ZIS dan Pendapatan perkapitanya lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang seharusnya kemiskinan di Indonesia itu dapat berkurang dapat lebih banyak daripada tahun 2019. Serta pada tahun 2015 kemiskinan di Indonesia terjadi peningkatan tetapi tidak dibarengi dengan turunnya IPM, Tenaga Kerja, ZIS dan Pendapatan, hal tersebut menjadi gap fenomena antara teori kemiskinan dengan realita yang ada. Novelty dari penelitian ini adalah dengan menggunakan pendapatan sebagai variabel moderating untuk mengembangkan penelitian yang ada dan tahun yang digunakan pada penelitian ini 2007-2022. Mempertimbangkannya latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini berjudul **“Pengaruh IPM, Tenaga Kerja, dan ZIS terhadap kemiskinan di Indonesia dengan Pendapatan sebagai variabel moderating pada tahun 2007-2022.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah IPM berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?
2. Apakah jumlah tenaga kerja berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?
3. Apakah ZIS yang ada di Indonesia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?
4. Apakah Pendapatan dapat memoderasi hubungan IPM terhadap Kemiskinan di Indonesia?
5. Apakah Pendapatan dapat memoderasi hubungan Tenaga Kerja terhadap Kemiskinan di Indonesia?
6. Apakah Pendapatan dapat memoderasi hubungan ZIS terhadap Kemiskinan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

³² Wicaksana dan Primandhana, “Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, dan Sektor Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Probolinggo.”

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh ZIS di Indonesia terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
4. Mengetahui dan menganalisis pendapatan memoderasi hubungan IPM, Tenaga Kerja dan ZIS terhadap Kemiskinan di Indonesia.
5. Mengetahui dan menganalisis pendapatan memoderasi hubungan Tenaga Kerja terhadap Kemiskinan di Indonesia.
6. Mengetahui dan menganalisis pendapatan memoderasi hubungan ZIS terhadap Kemiskinan di Indonesia.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakupan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masing-masing variabel yaitu IPM, tenaga kerja, ZIS terhadap kemiskinan yang ada di Indonesia dengan pendapatan sebagai variabel moderating.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi:

a. Bagi penulis

Berperan aktif sebagai mahasiswa ekonomi syariah akan memberikan wawasan lebih mendalam tentang variabel IPM, tenaga kerja, dan ZIS terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia dengan pendapatan sebagai variabel moderating..

b. Bagi akademisi

Memberikan ruang bagi akademisi untuk mengembangkan temuan dari penelitian ini serta menerapkan hasil penelitian dalam konteks keilmuan.

c. Bagi pemerintahan

Agar pemerintah dapat melakukan pembangunan dengan kebijakan yang lebih terfokuskan untuk mengurangi ketimpangan antar daerah, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, mendistribusikan pendapatan secara merata, mengoptimalkan program ZIS agar dapat memberikan dampak yang maksimal untuk mengurangi kemiskinan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan mencerminkan jalannya pemikiran pengarang dari permulaan hingga penutupan penulisan. Hubungan saling

terkait antara bab-bab dalam penulisan ini menggariskan keseluruhan kerangka analisis. Berikut adalah penjelasan sistematika penulisan:

BAB I : Pendahuluan ini mengungkapkan konteks topik yang akan diselidiki, merinci pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian, menyatakan tujuan penelitian yang mencakup pencapaian tertentu, menjelaskan manfaat penelitian yang diperoleh atau diberikan kepada pihak terkait. Terakhir, gambaran keseluruhan dari pembahasan setiap bab dalam penelitian ini disajikan dalam sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori dan Pembentukan Hipotesis dibahas dalam bab kedua ini, mengeksplorasi teori-teori yang relevan dengan penelitian, termasuk IPM, tenaga kerja, ZIS, kemiskinan, dan pendapatan. Selain itu, bab ini menguraikan penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan tema penelitian. Berdasarkan teori-teori dan hasil penelitian sebelumnya, hipotesis dan kerangka teori dikembangkan sebagai dasar bagi penelitian ini.

BAB III : Bagian Metode Penelitian menjelaskan mengenai variabel penelitian dan definisi operasional dari setiap variabel yang diterapkan dalam studi ini. Selanjutnya, bagian ini membahas objek penelitian, mencakup jenis penelitian, sumber data, dan teknik analisis data yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini.

BAB IV : Hasil Penelitian dan pembahasan menjelaskan temuan penelitian dalam bentuk analisis deskriptif, beserta interpretasi hasil data yang telah diolah. Penjelasan yang disajikan dalam bagian ini menjadi tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah.

BAB V : Bagian Penutup mengandung rangkuman hasil penelitian sebagai penjawab rumusan masalah. Bab V memuat rekomendasi dan masukan yang diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terkait penelitian ini. Selain itu, peneliti juga mencatat kelemahan yang ditemui dalam penelitian ini sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut di masa mendatang.